


Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD dan LKPP) Perspektif Akuntansi Sektor Publik

Lamtiar Sinaga¹, Gina Ami Sefi Ginting², Febyana Sembiring³, Pia Lestari Saragih⁴, Putri Kemala Dewi Lubis^{5*}, Khairani Alawiyah Matondang⁶

¹⁻⁶Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: putrikemala@unimed.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5996>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Mar 2026

Revised: 15 Mar 2026

Accepted: 02 April 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas, LKPP, LKPD, Akuntansi Sektor Publik, Transparansi.

Keywords:

Accountability, LKPP, LKPD, Public Sector Accounting, Transparency

ABSTRACT

Akuntansi sektor publik menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama good governance. Berdasarkan stewardship theory, pemerintah sebagai pengelola amanah wajib melaporkan penggunaan sumber daya publik kepada rakyat. LKPP dan LKPD menjadi instrumen penting dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui LKPP dan LKPD dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan menggunakan laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK, dan regulasi periode 2021–2026. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kualitas laporan dipengaruhi oleh sinergi kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas SPIP. Transparansi juga terbukti meningkatkan kinerja instansi dan kepercayaan publik. Namun, masih terdapat tantangan pada sinkronisasi regulasi pusat-daerah dan integrasi SIPD. Kesimpulannya, opini WTP tidak boleh sekadar target administratif, tetapi harus disertai penguatan pengendalian internal yang berdampak pada efisiensi anggaran dan kesejahteraan masyarakat.

Public sector accounting places accountability and transparency as the main pillars of good governance. Based on stewardship theory, the government, as the trustee, is obliged to report the use of public resources to the public. The Financial Reporting System (LKPP) and the Regional Financial Reporting System (LKPD) are important instruments in fulfilling this responsibility. This study aims to analyze the accountability of state financial management through the LKPP and LKPD using a descriptive qualitative method based on literature studies using financial reports, BPK audit results, and regulations for the 2021–2026 period. The results indicate that accountability and report quality are influenced by the synergy of human resource competencies, the use of information technology, and the effectiveness of the SPIP (State Budget Implementation Report). Transparency has also been shown to improve agency performance and public trust. However, challenges remain in the synchronization of central and regional regulations and the integration of the SIPD (State Budget Implementation Report). In conclusion, the WTP opinion should not be merely an administrative target but must be accompanied by strengthening internal controls that impact budget efficiency and public welfare.



This is an open access article under the CC–BY-SA license.



How to Cite: Lamtiar Sinaga, et al (2026). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD dan LKPP) Perspektif Akuntansi Sektor Publik, 4(4) 23458-23466. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5996>

PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca-reformasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem manajemen keuangan negara. Era *New Public Management* (NPM) yang diadopsi secara global mendorong instansi pemerintah untuk tidak lagi sekadar menghabiskan anggaran,

melainkan beralih pada orientasi hasil dan akuntabilitas publik. Dalam konteks akuntansi sektor publik, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah kontrak moral dan hukum antara pemerintah sebagai agen dan rakyat sebagai principal dan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen krusial yang menjembatani hubungan tersebut, berfungsi sebagai cermin transparansi atas pengelolaan sumber daya ekonomi bangsa. Kedua laporan tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Landasan hukum pengelolaan keuangan negara diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Regulasi ini mewajibkan setiap entitas pelaporan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 2006, hal. 2). Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas dalam sektor publik memiliki dimensi yang luas, mencakup akuntabilitas kejujuran, hukum, proses, program, hingga kebijakan. LKPP dan LKPD secara substansial mencakup seluruh dimensi tersebut dengan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja operasional pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Mardiasmo, 2021, hal. 28).

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pertanggungjawaban (accountability mechanism) sekaligus sebagai media transparansi kepada publik. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tidak hanya mencerminkan posisi keuangan pemerintah, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pemerintah telah mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien. Menurut Annisa, Syamsuddin, dan Rusli (2025), kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan laporan tersebut. Penerapan standar akuntansi yang baik akan meningkatkan kualitas informasi keuangan sehingga mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik (Syamsudin & Rusli, 2025, hal. 2).

Namun, penyusunan laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kualitas penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan secara transparan dan komprehensif (Akibun et al., 2025, hal. 2). Meskipun secara kuantitas jumlah entitas yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkat, hal ini tidak serta merta menghapuskan risiko ketidakefisienan atau penyimpangan anggaran. Terdapat diskursus dalam akuntansi sektor publik mengenai relevansi opini audit terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bastian (2022), kualitas laporan keuangan sektor publik harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, bukan sekadar memenuhi prasyarat formalitas audit (Bastian, 2022, hal. 74). Di sisi lain, laporan keuangan pemerintah juga sering digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Penelitian Sapitri dan Arza (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang diukur melalui opini audit Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah (Sapitri & Arza, 2024, hal. 3).

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, laporan keuangan pemerintah juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses pengambilan kebijakan publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah, legislatif, maupun masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal serta kinerja pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan sumber daya publik (Wahtan et al., 2025, hal. 8). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Basis akrual memungkinkan pemerintah untuk menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih komprehensif dibandingkan

dengan basis kas (Afriyeni et al., 2024, hal. 2). Namun, transisi ini menuntut kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK (2023) yang menunjukkan bahwa permasalahan umum dalam LKPD masih berkisar pada pengelolaan aset tetap, kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (BPK, 2023, hal. 117).

Perspektif akuntansi sektor publik menekankan bahwa laporan keuangan harus mampu memenuhi fungsi *stewardship*. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang dipercaya untuk mengurus aset publik (Amerieska et al., 2023, hal. 3). Akuntabilitas yang diwujudkan melalui LKPP dan LKPD menjadi sangat vital untuk membangun *public trust*. Tanpa laporan keuangan yang akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah akan tergerus, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas kebijakan publik. Oleh karena itu, sinkronisasi antara LKPP di tingkat pusat dan LKPD di tingkat daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan potret keuangan negara yang utuh dan konsolidasian (Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian). Karena melalui laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran daerah serta sejauh mana anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, digitalisasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi variabel baru dalam ekosistem akuntansi sektor publik di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeragamkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di seluruh Indonesia agar data keuangan lebih valid dan mudah diaudit. Namun, kendala infrastruktur teknologi dan resistensi terhadap perubahan di beberapa daerah menjadi hambatan nyata. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Patanggung et al (2025), integrasi sistem informasi keuangan negara memiliki korelasi positif terhadap ketepatan waktu pelaporan, namun memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi "sampah data" yang dapat menyesatkan pengguna laporan (Patanggung et al., 2025, hal. 2).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran LKPP dan LKPD dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari kacamata akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas standar akuntansi dan peran audit eksternal dalam mendorong transparansi di sektor pemerintahan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki kualitas pelaporan keuangan negara demi kemaslahatan publik secara luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui instrumen laporan keuangan (LKPP dan LKPD). Menurut Safarudin et al (2023), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis implementasi prinsip-prinsip akuntansi sektor publik pada entitas pemerintah dengan mengkaji berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan (Safarudin et al., 2023, hal. 14).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif, yang meliputi tiga alur kegiatan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen untuk memfokuskan analisis pada isu akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara naratif dan terstruktur untuk mempermudah pemahaman terhadap pola hubungan antara kebijakan akuntansi dengan tingkat akuntabilitas pemerintah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan verifikasi atas temuan penelitian untuk memastikan validitas analisis yang dilakukan (Siti Fadjarajani et al., 2020, hal. 203).

Guna menjamin keabsahan data kualitatif, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data keuangan pemerintah dengan laporan audit BPK serta perspektif dari pengamat kebijakan publik. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis fenomena yang ditemukan menggunakan berbagai teori akuntansi

sektor publik, seperti *Agency Theory* (Teori Keagenan) dan *Stewardship Theory* (Teori Stewardship). Melalui prosedur metode yang ketat ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan interpretasi yang mendalam mengenai sejauh mana LKPP dan LKPD telah bertransformasi menjadi alat akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntabilitas Sektor Publik dalam Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bukan sekadar produk administratif, melainkan manifestasi dari *Stewardship Theory*. Teori ini memosisikan pemerintah sebagai pengelola (*steward*) yang bertindak demi kepentingan publik (*principal*). Dalam sistem keuangan publik di Indonesia, akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil analisis terhadap dokumen laporan keuangan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal diwujudkan melalui penyampaian laporan kepada lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan BPK, sementara akuntabilitas horizontal dilakukan melalui publikasi laporan keuangan kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi (Antonius, 2023, hal. 2). Dalam perspektif akuntansi sektor publik, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan manifestasi dari *Stewardship Theory*, di mana pemerintah bertindak sebagai pengelola (*steward*) bagi kepentingan publik (*principal*). Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas ini sangat bergantung pada kejelasan desentralisasi kewenangan keuangan antara pusat dan daerah. Prinsip otonomi daerah hanya dapat terlaksana sepenuhnya jika terdapat pembagian kewenangan keuangan yang eksplisit, yang memungkinkan daerah memiliki kemandirian dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri (Armin et al., 2023, hal. 3).

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, menjadi fondasi utama dalam pembahasan ini. Penggunaan basis akrual memungkinkan LKPP dan LKPD menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kewajiban jangka panjang dan hak-hak pemerintah yang belum tertagih. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas sektor publik menuntut penyajian informasi yang tidak hanya berfokus pada aliran kas, tetapi juga pada ekuitas dan kinerja operasional. Data menunjukkan bahwa sejak periode 2021, integrasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) telah memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai efisiensi penggunaan sumber daya publik, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan diskrepansi dalam pencatatan aset tetap di berbagai daerah (Mardiasmo, 2021, hal. 103).

Pentingnya laporan keuangan pemerintah sebagai instrumen akuntabilitas dapat dilihat dari mekanisme audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan serta kualitas pengelolaan keuangan negara. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disusun, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kualitas akuntabilitas keuangan negara secara objektif dapat diukur melalui opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2023 dan 2024, tren pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik pada LKPP maupun LKPD menunjukkan grafik yang stabil di angka di atas 90% (BPK, 2023, hal. 301). Dalam kacamata akuntansi sektor publik, opini WTP mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Namun, perspektif kritis dalam akuntansi sektor publik menekankan bahwa opini WTP bukanlah jaminan mutlak bebas dari praktik korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas kepatuhan standar akuntansi dan efektivitas sistem pengendalian intern (Sapitri & Arza, 2024, hal. 3). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Arsani (2020) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan kualitas penyusunan laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pencapaian sasaran instansi. Hal ini membuktikan bahwa LKPD yang akuntabel bukan sekadar prasyarat administratif, melainkan instrumen untuk meningkatkan

kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran (Sihombing & Arsani, 2020, hal. 1)

Bastian (2022) berpendapat bahwa fokus akuntabilitas harus bergeser dari sekadar mengejar opini "WTP" menuju "WTP yang berkualitas". Hal ini dikarenakan masih sering ditemukannya permasalahan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, seperti kelemahan dalam penatausahaan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan pada proyek infrastruktur, dan ketidakpatuhan dalam pemungutan pajak/retribusi daerah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal akuntabilitas telah terpenuhi, secara substansi masih terdapat celah dalam pengendalian anggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, LKPP dan LKPD harus dipandang sebagai instrumen evaluasi kinerja, bukan sekadar simbol prestasi politik bagi kepala daerah atau kementerian.

Digitalisasi dan Integrasi Sistem: Peran SIPD dan SAKTI

Pencapaian akuntabilitas di era modern sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi. Transformasi digital melalui penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) di level pusat dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di level daerah menjadi variabel krusial. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa integrasi sistem ini bertujuan untuk menciptakan *single source of truth* dalam data keuangan negara. Dengan sistem yang terintegrasi, peluang untuk melakukan manipulasi data (*creative accounting*) dapat diminimalisir karena setiap transaksi terekam secara *real-time* dan terlacak (*traceable*).

SIPD merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan pemerintah daerah secara terintegrasi. Melalui SIPD, pemerintah daerah dapat mengelola data keuangan secara lebih sistematis dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif (Hardianti et al., 2025, hal. 4). Sementara itu, SAKTI merupakan sistem informasi keuangan yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan berbagai proses pengelolaan keuangan di tingkat kementerian dan lembaga. Sistem ini mengintegrasikan berbagai modul pengelolaan keuangan, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan dalam satu platform yang terintegrasi. Implementasi SAKTI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah (Ardyanto et al., 2025, hal. 2).

Digitalisasi sistem keuangan melalui SIPD dan SAKTI memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu manfaat utama dari sistem tersebut adalah peningkatan akurasi dan konsistensi data keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, digitalisasi sistem keuangan juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Farizi et al., 2025, hal. 5). Data keuangan yang tersimpan dalam sistem dapat diakses dan dianalisis secara lebih mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga pengawas dan auditor. Hal ini memungkinkan proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara lebih efektif (Suryanto & Dai, 2025, hal. 8).

Namun, implementasi SIPD di berbagai daerah selama periode 2022-2025 masih menghadapi hambatan teknis yang signifikan. Banyak pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam sinkronisasi data antara perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) hingga ke pelaporan. Maharani dkk (2026) mencatat bahwa kegagalan sistem dalam menangkap kompleksitas transaksi di daerah sering kali mengakibatkan keterlambatan penyampaian LKPD kepada BPK. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, ketepatan waktu (*timeliness*) adalah salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang sangat vital. Jika laporan terlambat disajikan, maka nilai informasi tersebut untuk pengambilan keputusan akan berkurang, sehingga melemahkan fungsi akuntabilitas itu sendiri (Maharani et al., 2025, hal. 7).

Tantangan SDM dan Kompleksitas Aset Negara

Mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas menghadapi tantangan multifaktor. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit internal secara

simultan menjadi penentu utama kualitas LKPD. SDM yang kompeten merupakan pilar penggerak organisasi dalam menjalankan roda akuntansi pemerintahan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi sangat krusial untuk menjamin keakuratan perhitungan, kecepatan pemrosesan transaksi, dan keamanan penyimpanan data keuangan dalam jumlah besar (Pebriani, 2024, hal. 2). Tantangan utama yang konsisten muncul dalam analisis akuntabilitas LKPP dan LKPD adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi. Kurangnya tenaga akuntan profesional di pemerintah daerah, terutama di wilayah tertinggal, menyebabkan proses rekonsiliasi data sering kali tidak akurat (Naida, 2025, hal. 3). Selain faktor sumber daya manusia, kompleksitas pengelolaan aset negara juga menjadi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Permasalahan aset tetap atau yang sering disebut sebagai "masalah abadi" dalam akuntansi pemerintahan masih mendominasi temuan audit. Aset-aset yang berasal dari pelimpahan kewenangan atau pengadaan di masa lalu sering kali tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah, sehingga sulit untuk divalidasi nilainya dalam Neraca. Keterbatasan kompetensi SDM seringkali menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan maupun penyusunan laporan keuangan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta berpotensi menimbulkan temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Sitorus et al., 2025, hal. 3). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di bidang akuntansi sektor publik menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Selain SDM dan teknologi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai variabel moderasi yang menjaga agar proses pelaporan keuangan tetap berada pada jalur yang benar. Penguatan SPIP secara berkelanjutan diperlukan untuk memitigasi risiko kesalahan pencatatan dan penyimpangan anggaran. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas audit internal agar mampu memberikan fungsi pengawasan, pembinaan, dan reviu laporan keuangan secara profesional, objektif, dan independen sebelum hasil akhirnya diaudit oleh BPK.

Sinkronisasi LKPP dan LKPD dalam Mewujudkan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam sistem keuangan negara, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan yang saling terkait. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pemerintah pusat, sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Kedua laporan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari sistem pelaporan keuangan negara secara keseluruhan.

Sinkronisasi antara LKPP dan LKPD menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan negara yang konsolidasian dan komprehensif. Proses konsolidasi laporan keuangan bertujuan untuk menggabungkan berbagai laporan keuangan dari entitas pemerintah yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi keuangan negara. Puncak dari akuntabilitas keuangan negara adalah penyusunan laporan keuangan yang konsolidatif antara pusat dan daerah. Perbedaan dalam struktur akun atau rincian dalam LRA, LO, dan Neraca di berbagai daerah menuntut adanya sinkronisasi kebijakan akuntansi yang ketat agar informasi yang dihasilkan relevan bagi pengambilan keputusan nasional. Sinkronisasi ini memastikan bahwa potret kesehatan keuangan negara disajikan secara utuh dan transparan, yang pada akhirnya memperkuat posisi akuntabilitas pemerintah Indonesia di tingkat domestik maupun internasional (Annisa et al., 2024, hal. 1).

Namun dalam praktiknya, proses sinkronisasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai entitas pemerintah. Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi keuangan terintegrasi, masih terdapat perbedaan dalam implementasi sistem tersebut di berbagai instansi pemerintah. Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya manusia serta perbedaan tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing entitas pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penyajian informasi keuangan yang pada akhirnya dapat menyulitkan proses konsolidasi laporan keuangan. Sehingga, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penguatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi kebijakan akuntansi pemerintah menjadi langkah penting dalam mendukung proses sinkronisasi laporan keuangan pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui instrumen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mengalami transformasi signifikan dalam kerangka akuntansi sektor publik di Indonesia. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terbukti memperkuat fungsi *stewardship* pemerintah, di mana laporan keuangan tidak lagi sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan alat pertanggungjawaban yang mampu menggambarkan posisi keuangan negara secara lebih transparan dan andal. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten menunjukkan adanya komitmen institusional dalam mematuhi regulasi keuangan, namun perspektif akuntansi sektor publik menekankan bahwa kualitas akuntabilitas tersebut harus melampaui sekadar kepatuhan administratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan kualitas pelaporan keuangan berkorelasi positif terhadap kinerja pemerintah, yang berarti semakin akuntabel sebuah laporan keuangan, semakin tinggi pula kepercayaan publik dan ketercapaian sasaran instansi pemerintah.

Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala krusial yang masih membayangi efektivitas akuntabilitas keuangan negara. Permasalahan klasik terkait kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi, kompleksitas penatausahaan aset tetap, serta tantangan integrasi sistem informasi melalui SIPD dan SAKTI menjadi hambatan nyata dalam mencapai sinkronisasi laporan keuangan yang sempurna. Selain itu, dinamika politik anggaran dalam hubungan keuangan pusat dan daerah sering kali menciptakan celah regulasi yang menghambat kemandirian daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonominya secara akuntabel. Oleh karena itu, akuntabilitas yang dicapai melalui LKPP dan LKPD saat ini masih memerlukan penguatan pada aspek substantif guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dilaporkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai rekomendasi untuk langkah selanjutnya, pemerintah perlu melakukan penguatan berkelanjutan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi yang menjaga kualitas laporan keuangan dari risiko kesalahan dan penyimpangan. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi SDM di daerah melalui pelatihan akuntansi sektor publik yang berbasis teknologi informasi guna mengatasi kendala digitalisasi. Pemerintah juga disarankan untuk menyinkronkan regulasi antara pusat dan daerah agar tercipta harmonisasi kebijakan fiskal yang lebih solid. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai dampak langsung opini audit terhadap indikator kesejahteraan masyarakat secara empiris, guna menjawab diskursus mengenai relevansi opini WTP dalam menekan angka korupsi dan meningkatkan kualitas hidup publik secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Anggota Tim yang telah bekerja sama, berdiskusi, serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Editor dan Reviewer yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diperbaiki dan disempurnakan dengan lebih baik.

REFERENSI

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., Asrina, S., & Syaherwandi, S. (2024). Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkalis. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 474-485.
- Akibun, F., Biki, J. P., Timbert, F. M., & Latala, F. H. (2025). Pengaruh SPI, SIA, dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Perspektif Pemangku Kepentingan

- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Dalam. Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP), 1(1), 21–30.
- Amerieska, S., Narsa, I. M., & Ningsih, S. (2023). Manajemen Resiko Berbasis Stewardship dalam Keberlanjutan BUMDes. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 06(02), 173–189.
- Annisa, K., Fadillah, S. I., Putri, N. A., Shidqi, A., & Abdullah, S. (2024). Analisis Perbandingan Lkpd Antara Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Kabupaten Blora. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 329–340.
- Antonius, F. (2023). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Metode Vertikal Horizontal Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2020. *JURA : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 56–67.
- Ardyanto, D., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Implementasi Sistem Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kementrian Pertahanan Melalui Aplikasi Sakti. *JAFM: Journal of Accounting an Finance Management*, 6(5), 2773–2780.
- Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik Anggaran : Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(2), 185–204.
- Bastian, I. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Terbaru)*. Erlangga.
- BPK. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*.
- Farizi, S., Aisy, S., M, K. R., & Arifin, S. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Urgensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Pemerintahan Desa Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 9(2), 197–204.
- Hardianti, S., Dewi, R. S., Fauzi, I., & Wirananda, H. A. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam. *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(3), 125–134.
- Maharani, M. B., Fanida, E. H., Meirinawati, M., & Oktariyanda, T. A. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Aspek Tata Usaha Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya Metha. *Publika*, 14(1), 1–10.
- Mardiasmo, M. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. CV. Andi Offset.
- Naida, N. (2025). Optimalisasi Implementasi SIPD Melalui Klinik Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah : Pendekatan Kualitatif Di Kabupaten Tojo Una-Una. *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 3(2), 100–111.
- Patanggung, R. T., Reme, N., Roreng, P. P., & Putri, B. (2025). Accounting Data Integration Challenges in Local Government Information System Implementation : A Qualitative Case Study of the North Toraja Transportation Service. *Journal of Development Research*, 9(2), 304–311.
- Pebriani, R. A. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI*, 10(1), 55–62.
- Safarudin, R., Zuldamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Sapitri, W., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(3), 339–352.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi , LKPD dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 179–184.
- Siti Fadjarajani, Rosali, E. S., Patimah, S., Liriwati, F. Y., Nasrullah, N., Sriekaningsih, A., Daengs, A., Pinem, R. J., Harini, H., Sudirman, A., Ramlan, R., Falimu, F., Safriadi, S., Nurdiani, N., Lamangida, T., Butarbutar, M., Wati, N. M. N., Citriadin, Y., Widiastuti, I., ... Nugraha, M. S. (2020). *Metodologi Penelitian (Pendekatan Multidisipliner)*. Ideas Publishing.
- Sitorus, L., Uswatun, N., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Suryanto, S., & Dai, R. M. (2025). Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik : Strategi Efisiensi dan Transparansi. *Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 13(1), 96–111.
- Syamsudin, S., & Rusli, A. (2025). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi

- sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal pendidikan akuntansi indonesia*, 23(1), 12–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 2 (2006).
- Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni, S. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi , Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 363–381.